

Komunikasi Sosial dalam Konstelansi Keamanan Nasional Tataran Global (Analisis Framing Literatur Ajar Mata Kuliah Komunikasi Sosial)

Ilham Prisgunanto*

Abstrak

Eksistensi komunikasi sosial sebagai kajian mata kuliah apakah penting dalam tatanan konstelasi politik dunia? Pertanyaan ini memunculkan perdebatan panjang di kalangan ahli komunikasi terutama dalam forum-forum internasional dan lokal yang ada di laman-laman dan sosial media jejaring internet. Pemahaman keliru dan menyimpang akan arti sebenarnya komunikasi sosial terbentuk karena anggapan dan penafsiran masing-masing orang. Tulisan ini ingin membongkar dan memaknai arti sebenarnya tujuan dan maksud dari komunikasi sosial oleh si pemrakarsa yang dalam hal ini adalah Presiden Soeharto yang kemudian dikembangkan pada sisi akademis oleh Astrid. S. Susanto melalui literatur bahan ajar yang dibuat era 1980-an. Pisau analisis teoritik tulisan adalah analisis isi khusus framing dan juga kelompok atau komunitas (community), Analisis framing menggunakan model Gamson and Modigliani dengan mengkaji literatur isu-isu komunikasi sosial, seperti; buku Komunikasi Sosial (Bina Cipta, 1985), GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1978), dan Tap MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1978) dengan bingkai utama (core frame) keamanan nasional. Temuan menyebutkan, bahwa Komunikasi Sosial dibuat oleh Negara dalam keperluan 'kegalauan' atas permasalahan sosial akibat komunikasi menjelang era keterbukaan informasi. Isu integrasi dan kesatuan sosial menjadi bahasan penting karena memang dua hal inilah yang tergerus dengan adanya komunikasi konteks global. Dari sinilah perlu penekanan kesadaran dua hal ini pada perangkat dan aparatur penyelenggara Negara terutama Polisi sebagai pengemban keamanan dan stabilitas dalam negeri.

Kata Kunci: Keamanan Nasional, Komunikasi Sosial, aparatur, Polisi, Globalisasi, GBHN

Pendahuluan

Pemahaman bahwa keamanan nasional perlu dilihat dari berbagai sisi kerap dikaitkan dengan bentuk ancaman dan gangguan yang akan dihadapi negara. Dapat diartikan bahwa sifat pertahanan negara adalah segala

upaya pertahanan pelaksanaan universal yang didasarkan pada realisasi hak-hak dan kewajiban warga negara dan kepercayaan pada kekuatan itu sendiri. Ancaman di sini tidak hanya berbentuk musuh konvensional yang hanya dipandang dalam batas negara teritorial sehubungan dengan bangsa dan negara lain, melainkan lebih dari itu.

Keamanan nasional kerap dihubungkan dengan kebijakan nasional dan Negara tentang

* Dr. Ilham Prisgunanto, SS, M.Si adalah Pengajar tetap Komunikasi Sosial untuk Program Magister dan Sarjana Ilmu Kepolisian di STIK - PTIK, email : prisgunanto@gmail.com

upaya memunculkan keamanan dan stabilitas Negara yang kondusif. Dengan adanya keamanan akan memberikan rasa aman dan keberlangsungan hidup Negara baik dari sisi ekonomi, keamanan dalam negeri, energi dan lingkungan. Ancaman keamanan Negara tidak hanya berhubungan dengan musuh konvensional, seperti; negara tetangga, kartel narkoba dan teroris saja, melainkan lebih luas dan menyeluruh. Kebijakan dan langkah-langkah keamanan nasional biasanya lebih luas, seperti; mengkaji kekuatan ekonomi, sistem pertahanan dan keamanan langkah-langkah pertahanan dan kesiapsiagaan darurat sipil (termasuk undang-undang anti-terorisme), ketahanan infrastruktur, keamanan politik, keamanan lingkungan dan

Keamanan Nasional (Kamnas) bisa dimaknai sebagai kondisi dan fungsi untuk memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas (kenyamanan, kedamaian, tenteram dan tertib). Keamanan merupakan kebutuhan dasar manusia oleh sebab itu pemahaman tentang keamanan akan tergantung pada makna dan substansi yang terkandung di dalamnya terutama pada tata nilai, persepsi dan kepentingan. Dengan demikian maka dapat dikatakan sedemikian luas konteks keamanan dalam segi kehidupan manusia.

Keamanan nasional pada perkembangannya juga menyangkut pada perkembangan teknologi dan informasi. Satu yang diakui bahwa di era digital dengan informasi sebagai komoditas menjadikan perang informasi semakin marak, seperti perang kontra intelijen antar negara dengan menciptakan teror dan rasa ketakutan dengan membuat gangguan keamanan melalui penguasaan informasi. Dengan adanya jejaring internet menyebabkan pertukaran informasi makin maha dahsyat dan imbasnya adalah ledakan informasi yang menyebabkan membludaknya informasi di semua kanal informasi.

Ketakutan akan perubahan era komunikasi dan informasi sudah jauh diprediksi ilmu komunikasi sosial dari penguasaan ilmu pengetahuan dan penggunaan radar dalam jejaring intelijen (Susanto, 1983:12). Dugaan akan adanya penguasaan Negara melalui dunia maya yang terciptakan karena jejaringan internet dengan dominasi penggunaan komunikasi menjadi perhatian khusus Negara yang lebih penting daripada apapun. Mungkin prediksi literatur ilmu komunikasi sosial dianggap 'isapan jempol' dan hanya dijadikan sikap paranoid ahli ilmu komunikasi sosial saat itu. Padahal saat ini kondisi sedemikian memang benar-benar terjadi dan prediksi tersebut sangat tepat.

Komunikasi sosial sudah menjadi bahasan menarik dan penting di era 1980-an karena pembahasannya dianggap mampu menjembatani pelbagai problematika sosial melalui komunikasi. Dapat dipahami komunikasi sosial diarahkan pada integrasi sosial sehubungan dengan aktualisasi masalah-masalah kesadaran dan pengetahuan yang dikaitkan dengan proses sosialisasi. Sehubungan dengan istilah integrasi sosial di sini, komunikasi sosial akan mengarah kepada stabilitas politik, tertib sosial dan penerusan nilai-nilai lama juga baru yang dianggap adiluhung dan agung menurut masyarakat tertentu. Pembahasan komunikasi sosial kerap dikaitkan dengan konteks komunikasi politik seperti negara Indonesia. Komunikasi politik sehubungan dengan komunikasi dalam keperluan pencapaian pengaruh, bahasan komunikasi dalam konteks politik mampu mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Komunikasi politik dianggap kegiatan pra politik. Proses komunikasi politik adalah realisasi penggabungan/penghubungan kaitan masyarakat sosial dalam lingkup masyarakat. Komunikasi politik dari cara pandang sosial adalah pendidikan/kesadaran warga dalam hubungan kenegaraan.

Sehubungan dengan keamanan nasional era 1980-an, komunikasi sosial dalam keperluan penetapan identitas sosial dan peningkatan integrasi dan kesatuan bangsa. Komunikasi ditujukan untuk wawasan nusantara, dimana integrasi bangsa dapat terbentuk sehingga proses pembangunan dapat melaju dengan mudah dan berhasil.

Permasalahan

Dari pemaparan di atas maka dapat dijadikan pertanyaan yang menentukan arah dan pembahasan tersebut, yakni ;

Bagaimana pemahaman dan arah pendiri komunikasi sosial sehubungan dengan konteks keamanan konteks global?

Kajian Teoritik

Analisis isi adalah salah satu metode analisis kualitatif yang biasa diunakan di dalam studi ilmu komunikasi termasuk untuk menganalisis suatu berita, yang melihat bagaimana suatu peristiwa dimaknai, yang hal ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan bagian mana yang tidak diliput. Analisis *framing* juga melihat bagaimana fakta itu ditulis, hal ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, maupun judul suatu teks. (Wibowo, 2004: 37)

Ide tentang *framing* pertama kali dilontarkan oleh Baterson (1955). Pada awalnya frame dimaknai sebagai stuktur konseptual atau kerangka kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana dan menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh Goffman (1974) yang mengandalkan *frame* sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behaviour*) yang membimbing perilaku individu dalam membaca realitas (Sobur, 2006:162). Sudibyo menyatakan

bahwa analisis *framing* merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak dapat diingkari secara total., melainkan di belokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek – aspek tertentu, dengan menggunakan istilah – istilah yang punya konotasi tertentu dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya. Dengan kata lain bagaimana realitas dibingkai, dikonstruksi dan dimaknai oleh media (Krisyantono, 2008:251).

Dari perspektif komunikasi, analisis *framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2006:162). Dari beberapa definisi analisis *framing* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa analisis *framing* adalah suatu metode yang digunakan untuk membingkai suatu peristiwa dari cara pandang si penulis berita, dimana isi informasi tersebut meliputi fakta-fakta yang telah dipilih oleh penulis untuk ditonjolkan..

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis *framing* tentang isu komunikasi sosial yang diambil dari beberapa sumber seperti ; GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara), GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) dari Tap MPR No. IV/MPR/1978 dan Pidato Presiden Soeharto era Orde Baru. Analisis *framing* yang digunakan adalah model Gamson and Modigliani dengan mengutamakan model metafora atau majas pertautan yang digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis konteks sosial dalam kajian makro komunikasi guna mendapatkan pemaknaan global tentang isu yang diambil dalam kajian tulisan ini. Penelitian menggunakan *core frame* (pemingkaiian utama)

pada konteks keamanan nasional karena memang isu tersebut yang dianggap memiliki imbas besar dalam terbentuknya perkuliahan Komunikasi Sosial.

Model ini menganggap *frame* sebagai cara bercerita atau gugusan ide – ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan terhadap suatu wacana. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan berita. Cara pandang inilah yang disebut Gamson dan Modigliani sebagai kemasan (*package*). *Package* ini merupakan rangkaian ide yang menunjukkan isu apa yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan.

Studi awal Gamson mengenai *framing*, pertama kali juga berkaitan dengan studi mengenai gerakan sosial. Menurut Gamson, keberhasilan dari gerakan sosial terletak pada bagaimana peristiwa dibingkai sehingga

menimbulkan tindakan kolektif. (Eriyanto, 2002:220). Menurut Gamson, dalam pergerakan social paling tidak membutuhkan tiga *frame* atau bingkai, yaitu:

1. *Aggregate Frame*: proses pendefinisian isu sebagai masalah social. Bagaimana individu yang mendengar *frame* atas peristiwa tersebut sadar bahwa isu tersebut adalah masalah bersama yang berpengaruh bagi setiap individu.
2. *Consensus Frame*: proses pendefinisian yang berkaitan dengan masalah sosial hanya dapat diselesaikan oleh tindakan kolektif.
3. *Collective Action Frame*: proses pendefinisian yang berkaitan dengan kenapa dibutuhkan tindakan kolektif, dan tindakan kolektif apa yang seharusnya dilakukan. *Frame* ini mengikat perasaan kolektif khalayak agar bisa terlibat secara bersama-sama dalam protes/gerakan social (Eriyanto, 2002:221).

Tabel Model Framing Gamson dan Modigliani

<i>Frame (Media Package)</i> Seperangkat gagasan atau ide sentral ketika seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu. <i>Frame</i> ini didukung oleh perangkat wacana lain., seperti kalimat, kata dan sebagainya.	
<i>Framing Devices</i> (perangkat Framing) Berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangkat ini antara lain: permainan kata, kalimat, grafik/gambar, dan metafora tertentu.	<i>Reasoning Devices</i> (perangkat Penalaran) Berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Artinya ada dasar pembenaran dan penalaran alasan tertentu sehingga membuat gagasan yang disampaikan media tampak benar, alamiah dan wajar.
<i>Metaphors</i> Perumpamaan atau pengendalian	<i>Roots</i> Analisis kausal sebab akibat
<i>Catchphrases</i> Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan.	<i>Appeals to principle</i> Premis dasar, klaim-klaim moral
<i>Exemplars</i> Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai.	<i>Consequences</i> Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai
<i>Depiction</i> Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif. <i>Depiction</i> ini umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu. <i>Visual images</i> Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan.	

Temuan dan Pembahasan

Komunikasi sosial muncul di era tahun 1970-an namun baru mencuat dan menjadi pembahasan utama di era 1980-an. Pembahasan tentang komunikasi sosial menjadi penting ketika ada kesadaran akan globalisasi komunikasi dan informasi menjelang era keterbukaan informasi. Kesadaran akan *global village* seperti diprediksi oleh McLuhan menyentak semua orang bahwa kemungkinan ada munculnya desa global dengan adanya kemampuan interkoneksi informasi melalui jejaringan 'gila' yang kemudian akan dikenal internet (meski era itu belum dikenal jejaringan internet secara luas).

Kesadaran ini mengarah kepada kedaulatan dan wibawa Negara, karena memang obyek itulah yang akan tergerus dengan kehadiran tatanan masyarakat informasi baru konsep globalisasi. Ketakutan akan adanya ancaman pemahaman baru tentang dunia yang satu dalam konseptualisasi kampung kecil ini akan menihilkan jarak, wilayah, kekuatan hukum dan dominasi Negara. Orang tidak akan membahas batas-batas teritorial dalam kekuatan politik, hukum dan keamanan Negara, mereka hanya melihat konteks manusia sebagai anggota (*netter*) dalam penggunaan jejaringan internet (*user*). Kesadaran ini dianggap keliru karena semu dan tentu saja isu keamanan nasional menjadi penting. Apalagi dipahami era 1980-an dipenuhi dengan aktivitas perseteruan antara blok barat dan timur dengan dominasi kekuatan negara adi daya, antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet.

Perang dingin dua blok ini tidak hanya dalam konteks keamanan dan pertahanan saja, melainkan semua lini dan sendi kehidupan. Pengaruh ideologi dan perspektif orang kerap berbenturan sehingga muncul blok-blok fusi-fusi baru, sebut saja; NATO, SEATO, Pakta warsawa dan lain-lain yang merupakan bentuk respon terhadap pecahnya era perang dingin dan

menyatunya pada konsep globalisasi terhadap kesadaran akan penyatuan dan ketakutan atas keamanan nasional masing-masing Negara. Dipahami bahwa perang tidak dalam bentuk fisik yang ditunjukkan dengan pengerahan pasukan dan armada militer besar-besaran, melainkan melalui serangan yang sangat halus, seperti penularan akan konsep-konsep kehidupan baru melalui saluran budaya. Isu inilah yang mencuat dan jelas bahwa komunikasi sosial saat itu dianggap sebagai obat 'mujarab' dan ampuh untuk mengantisipasi serangan-serangan dari luar konteks global.

Dari hasil pemantauan terhadap sejumlah data literatur tersebut di atas tentang seputar isu komunikasi sosial yang ada, maka didapat hasil yang cukup signifikan bahwa bahasan akan mempersoalkan beberapa masalah penting, seperti;

Komunikasi Sosial Muncul Dalam Tataran Konsep Aplikatif Bukan Teoritis

Kesadaran tinggi akan ancaman dan gangguan dari luar dan dalam negeri konteks keamanan ini menyadarkan orang akan pentingnya komunikasi sosial sebagai alat untuk mengantisipasi semua hal tersebut. Namun sayangnya dari pemantuan literatur konsep komunikasi sosial tidak ada kajian khusus yang membahas apa komunikasi sosial itu sendiri. Dalam artian sesungguhnya diketahui, bahwa belum ada kesepakatan komunikasi sosial itu menurut para pakar dan ahli komunikasi.

Dari penelusuran jejaringan internet isu tentang komunikasi sosial dianggap bahwa komunikasi sosial adalah komunikasi yang membicarakan isu-isu sosial dengan pembahasan utama konflik dan perpecahan yang ada di masyarakat. Pendapat ini jelas keliru bila dikaitkan dengan apa yang dimaksud komunikasi sosial oleh para pendiri dan pemrakarsa dikaitkan dengan keamanan dan stabilitas nasional. Kebingungan ini sangat

beralasan karena peletakan pijakan pertama tentang komunikasi sosial tidak menyebutkan dalam kajian ilmu komunikasi apa komunikasi sosial itu ada.

Komunikasi sosial yang dimaksud dalam literatur-literatur awal menyebutkan bahwa komunikasi sosial adalah antisipasi akan adanya serangan dari luar konteks budaya dan sosial yang ada. Komunikasi di sini dianggap sebagai obyek bukan subyek dalam pemikiran para kaum obyektivis. Perlu dipahami, bahwa memang era tersebut lebih dalam semangat obyektivis bukan subyektivis seperti sekarang ini. Pemahaman kaku tentang komunikasi sosial sebagai alat membuat orang terjebak dalam konteks aplikatif, bukan teoritik. Komunikasi sosial dianggap sebagai sesuatu yang sederhana, mudah dilakukan dan bisa berjalan begitu saja (*common sense*) tanpa dipelajari.

Anggapan inilah yang akhirnya menyebabkan perkuliahan komunikasi sosial hilang bentuk dan tidak tahu mau kemana dalam perkembangan ke depan. Tidak adanya panduan khusus tentang apa dan bagaimana komunikasi sosial dalam penerapan di lapangan. Alhasil akan muncul kebingungan-kebingungan yang luar biasa akan penerapan pengajaran komunikasi sosial ini di lembaga-lembaga pendidikan. Pada akhirnya arah dan sasaran pengajaran komunikasi sosial diserahkan sepenuhnya pada pengajar bukan pada arti esensi sesungguhnya komunikasi sosial menurut para pakar dan pendiri saat itu. Komunikasi sosial dipahami sebagai kajian yang 'liar' dan hilang bentuk, tak heran akhirnya mata kuliah ini banyak dihapus di banyak lembaga pendidikan karena dianggap tidak jelas mau kemana luaran dari pendidikan mata kuliah ini.

Arah dan tujuan komunikasi sosial jelas untuk memprediksi ancaman dan gangguan dalam masyarakat yang sangat halus melalui penetrasi budaya. Pola agitasi dan provokasi

informasi menjadi bahasan penting dalam pengajaran mata kuliah ini. Dengan demikian maka dapat penulis letakkan dasar bahwa perkuliahan komunikasi sosial seharusnya berdiri dalam kajian komunikasi antar budaya (*intercultural communication studies*) bukan pada konteks sosiologis murni atau ilmu kemasyarakatan yang banyak disalahtafsirkan oleh banyak literatur yang muncul setelah era 1990-an.

Tentu saja kajian utama ini harus dibarengi dengan isu-isu yang menyertai keamanan dan stabilitas nasional, yaitu perspektif komunikasi politik (*political communication*). Bagi para pakar dan pengamat komunikasi sadar sepenuhnya becemin dari Harrold Lasswell pakar komunikasi politik di Amerika Serikat, bahwa ada beberapa cabang penting yang perlu dikaji khusus dalam komunikasi politik, seperti; retorika dan strategi juga taktik dalam berkomunikasi.

Praktik agitasi dan provokasi bisa terjadi dalam komunikasi langsung di masyarakat melalui ceramah dan penyuluhan, sebab itulah peserta didik harus mampu melakukan perlawanan (*conter*) dengan pengembangan potensi dan kemampuan komunikasi langsung di masyarakat dalam bentuk berbicara di depan umum (*public speaking*). Tidak selalu dalam praktik, namun setidaknya memahami tata cara dan teori berbicara di depan publik dalam keperluan kesadaran akan pentingnya komunikasi sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat orang Romawi bahwa kemenangan melalui komunikasi lebih agung daripada kemenangan melalui kekuatan fisik berperang.

Di lain sisi pengembangan komunikasi sosial juga kerap dikaitkan dengan penguasaan dan pengendalian media massa. Dipahami bahwa menjelang era keterbukaan ditandai dengan menjamur dan berkembang pesatnya media massa. Banyak orang mengidentikan keberadaan pers dengan kebebasan bersuara dan

demokratisasi informasi. Istilah pers bebas (*free press*) mencuat sejalan dengan era kemerdekaan dan kebebasan. Yang pada akhirnya pers bebas (*free press*) menjadi salah satu aliran dalam sistem etika media massa dalam kajian media massa. Kemerdekaan Amerika Serikat ditandai dengan kebebasan media massa karena banyak orang mengetahui revolusi Amerika Serikat terhadap Inggris ditandai dengan aksi ketidakpercayaan *mucraker-mucraker* atau para insan pers Amerika Serikat dengan membongkar kebobrokan pemerintah lalim kolonial Inggris di tanah Amerika Serikat (Straubhaar and La Rose, 20).

Pemahaman akan seluk beluk media massa mutlak perlu dalam menuju masyarakat pers bebas seperti saat ini. Kerja media massa yang tidak berjalan sendiri karena ada beberapa pihak yang memiliki tarik ulur kepentingan di dalamnya yang membentuk proses produksi isi media massa yang sedemikian kompleks dengan kepentingan beberapa pihak. Mulai dari kepentingan pemilik (*owner*), pengelola media massa, insan pers sampai dengan perseturuan ideologi dan golongan, juga dominasi kekuatan seperti; Negara dan komunitas. Di sini peserta didik harus memahami kerja unik pers yang sedemikian kompleks dan penuh dengan kepentingan.

Komunikasi Sosial Khusus Membahas Bahasa Konteks Global

Isu kedua yang tidak kalah penting dan dianggap sepele adalah masalah penguasaan bahasa. Sedemikian memperhatikan dan pekanya para ahli komunikasi sosial terdahulu menjelang memasuki era keterbukaan terbukti dengan begitu memahami tentang arti pentingnya penggunaan bahasa dalam tata pergaulan dunia. Penguasaan bahasa asing yang menjadi bahasa pergaulan dalam keperluan berkomunikasi sehari-hari menjadi mutlak perlu. Dapat dibayangkan, bahwa para pemikir komunikasi sosial sudah jauh-jauh hari memikirkan penggunaan bahasa

dalam konteks etika dan tata pergaulan yang luas di masyarakat. Di sini para pendiri komunikasi sosial memahami betul arti penti tata pergaulan era keterbukaan informasi menjadi syarat penting yang tidak dapat dihindari oleh manusia modern.

Kondisi saat ini nyata terbukti dengan adanya era AFTA atau pasar bebas yang diutamakan adalah tata pergaulan yang etis dan menyejukkan di antara mereka yang berhubungan dan bergaul. Keterbukaan masyarakat ASEAN yang sudah dilakukan saat ini telah membuka sekat-sekat budaya yang ada di masyarakat ASEAN. Dengan pemahaman mereka yang tidak mau terbuka dan membaaur akan hancur dalam kebutaan pandangan skeptis di masyarakat global.

Manusia di era global yang ditandai dengan konsep digital ini dituntut untuk bisa menjadi kaum kosmopolit, yang artinya bisa menjadi *transetter* kepada masyarakatnya sesuai dengan perkembangan yang ada. Berbahasa tentu saja tidak lepas dari kesadaran yang tinggi akan budaya yang ada, baik itu budaya asing yang tertuju maupun budaya lokal mereka sendiri. Kesadaran akan arti pentingnya budaya ini dan terbukanya diri dengan budaya asing dengan tidak melupakan budaya nasional yang berakar dari kebudayaan lokal merupakan isu-isu sentral dalam upaya Negara membentengi masyarakatnya dalam memahami apa itu era globalisasi.

Penguasaan bahasa asing, bukan berarti melupakan budaya nasional maupun lokal karena itu dianggap sebagai benteng terakhir kesadaran nasional yang akan mengurus keamanan dan stabilitas nasional yang ada. Kekhawatiran penggunaan bahasa yang serampangan oleh orang Indonesia dalam pergaulan komunikasi sudah diprediksikan oleh ahli komunikasi sosial yakni dengan gandrungnya manusia Indonesia modern dengan menggunakan bahasa asing dan

melupakan bahasa sendiri dengan anggapan, bahwa budaya asing lebih adiluhung daripada budaya sendiri. Hal ini tentu saja akan mengarah kepada kiblat budaya dalam tata pergaulan di masyarakat yang dalam konteks ini adalah dunia.

Tidak salah bila penulis meletakkan komunikasi antar budaya sebagai landasan utama penerapan kajian studi komunikasi sosial dalam penerapan di lapangan. Memang perlu penguasaan atas bahasa, namun yang lebih perlu lagi adalah interaksi antar manusia dalam konteks budaya antar bangsa. Peserta didik diharapkan bisa 'luwes' dalam tata pergaulan masyarakat internasional alhasil akan ada persaingan global di berbagai bidang dalam percaturan dunia internasional.

Perlu bagi manusia Indonesia modern memahami bangsa asing terutama budaya, adat istiadatnya dan kebiasaan mereka melalui penggunaan bahasa asing. Tentu saja penggunaan bahasa asing dikaitkan dengan penguatan bahasa nasional dan lokal terlebih dahulu supaya manusia Indonesia modern tidak melupakan dan kehilangan identitas bahasa mereka sendiri dalam percaturan tata pergaulan internasional. Landasan pemikiran ini berangkat dari rasa kecintaan mereka menggunakan bahasa nasional dan daerah yang dimiliki. Tidaklah salah bila kebangkitan bangsa Indonesia dahulu diawali dengan peristiwa sumpah pemuda dengan klausul berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dari kesadaran itulah muncul arti kebangsaan yang hakiki bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa berbahasa asing bukan berarti melupakan dan meremehkan bahasa asli sendiri, yaitu; bahasa Indonesia di antara bahasa-bahasa asing.

Urgensi Petugas Negara Mahir Kemampuan Komunikasi di Lapangan

Salah satu yang harus diakui, bahwa ancaman terbesar dalam menghadapi globalisasi adalah

pengaruh budaya dari bangsa lain. Ancaman ini sudah pasti mengarah kepada konteks keamanan dan pertahanan baik luar dan dalam negeri. Ancaman ini akan merongrong kedaulatan dan kehormatan bangsa yang berakhir pada hancurnya dan rontoknya kekuasaan absolut sebuah negara. Tentu saja dalam hal ini pengaruh asing kepada dalam negeri sangat tergantung dari bagaimana penerimaan dari penduduk atau warga masyarakat negara tersebut. Namun satu yang harus dipahami, bahwa warga tidaklah dapat dikatakan sebagai pihak yang cerdas dalam memahami pengaruh dari luar. Tak heran, bila penekanan aspek legalitas menekankan bahwa yang perlu sadar dan memahami kondisi ancaman dari luar terlebih dahulu adalah pengelola dan aparatur Negara, bukan warga.

Sesuai dengan yang termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1978 tentang Komunikasi Sosial yang perumusannya ada pada Bab IV tentang Pola Umum Pelita ketiga khususnya tentang no. D....dalam bidang politik no. f yang mengatakan, "meningkatkan terselenggaranya komunikasi sosial, timbal balik antara masyarakat, antara masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat maupun dengan Pemerintah". (Susanto, 1985:17)

Dari pernyataan ini jelas bahwa sejak dahulu Negara sedemikian serius memandang komunikasi sosial sebagai upaya Negara menginformasikan hasil Pembangunan dan pencapaian yang sudah diraih. Di samping itu juga komunikasi juga dianggap sebagai obat mujarab mengetahui suara-suara di tingkat bawah terhadap terselenggaranya Pembangunan Nasional dimaksud. Di sini titik berat adalah kesadaran masyarakat dengan terlebih dahulu ada upaya timbal balik Negara menyadarkan masyarakat dengan memberikan informasi relevan. Tentu saja memberikan informasi relevan tidaklah mudah tergantung cara penyampaian dan teknik berkomunikasi yang baik.

Logika dari aspek legalistik di atas menyebutkan bahwa aparatur Negara harus mampu berkomunikasi timbal balik dengan masyarakat. Dalam artian mudah adalah aparat harus memiliki kemampuan komunikasi yang saat itu dikenal dengan istilah komunikasi sosial. Tanpa memiliki kemampuan komunikasi tidak mungkin petugas negara sebagai aparatur bisa menyampaikan hasil-hasil yang sudah dicapai oleh Negara. Tidak hanya itu saja apalagi ada tuntutan aparatur Negara harus peka dan sensitif dengan keluhan dan gugatan dari masyarakat terhadap hasil pembangunan yang ada. Pada literatur di atas juga disebutkan bahwa sudah ada kekhawatiran akan keterasingan masyarakat pedesaan dengan tidak sampainya informasi hasil pembangunan, alhasil akan ada tersumbatnya informasi melalui saluran yang menggunakan aparatur Negara.

Pernyataan ini jelas seperti pemaparan di bawah ini;

“Komunikasi sosial bersifat timbal balik mementingkan adanya dialog antara kedua belah pihak, yaitu antara pihak yang memberikan penerangan atau yang menyampaikan pesan dengan pihak yang menerima pesan/penerangan, dan antara khalayak sendiri,” (Repelita III dalam bab 25 tentang penerangan, pers dan komunikasi sosial)

Dari pernyataan Repelita III diketahui, bahwa memang perlu ada kesinergisan dan keserasian komunikasi sosial antara aparatur Negara dengan masyarakat. Komunikasi timbal-balik diharapkan hadir dalam penyelenggaraan Negara dan masyarakat bisa diikutsertakan dengan pola partisipasi aktif terhadap jalannya roda Pemerintahan. Pesan menjadi hal yang perlu diperhatikan sebagai komoditas dalam manusia berkomunikasi dalam kehidupan ini.

Ketakutan yang muncul apabila komunikasi tidak muncul adalah terbentuknya kelompok masyarakat yang antipati dan membenci semua

program yang dihasilkan oleh Negara. Kelompok ini karena merasa tidak diperhatikan oleh Negara akhirnya muncul sebagai kelompok-kelompok garis keras yang pada akhirnya mudah tersulut dan menjadi biang konflik di wilayah bahkan sampai terjerumus menjadi kelompok jaringan teroris internasional yang marak saat ini. Kesadaran-kesadaran ini sudah disebutkan sejak dahulu, dan letaknya jelas sebagai saluran komunikasi, maka aparat Negara mutlak harus mampu berkomunikasi sosial.

Kemampuan komunikasi sosial di sini tidak melulu berkemampuan komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*) atau penyuluhan dan penerangan saja, melainkan lebih dari itu. Dari literatur komunikasi sosial penggunaan istilah pentingnya memperhatikan aspek informasi dalam berkomunikasi sosial adalah merupakan sinyal bahwa peserta didik komunikasi sosial harus peka dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang ada saat ini. Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan kemunculan dunia informasi era 4.0 memaksa orang larut dan harus mampu berkomunikasi dengan gawai berbantuan jejaring internet yang menghubungkan manusia dengan manusia lain kapan saja dan dimana saja.

Oleh sebab itu kemampuan komunikasi sosial dalam konteks digital menjadi sangat ‘*urgent*’ dalam keperluan bagaimana aparat Negara di lapangan dalam upaya menciptakan pola komunikasi timbal balik yang serasi seperti yang diamanatkan dan diharapkan Negara melalui dasar Komunikasi Sosial Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kemampuan di sini adalah bagaimana mereka ‘gandrung’ menggunakan situs internet, forum, saraha obrol (*chatting*) sampai dengan sosial media internet lain. Komunikasi sosial tidak saja membahas tentang perintah (*command*) namun juga isi dan sasaran pesan yang akan disampaikan dalam informasi yang ada.

Perhatian serius komunikasi sosial juga difokuskan kepada konstelansi dunia politik di Indonesia yang mengalami perubahan drastis dengan iklim otonomi daerah yang sedemikian menguat. Komunikasi politik adalah upaya mempengaruhi dan mengarahkan orang akan maksud tertentu. Pemahaman ini menyadarkan semua pihak bahwa aparatur Negara juga harus dan perlu memahami bahkan bisa mempraktikkan komunikasi politik terhadap masyarakat yang mereka layani. Kesadaran dan daya peka terhadap arah dan tujuan politik lokal yang akan mengerucut pada politik nasional harus bisa dibaca dan dipetakan oleh aparatur negara. Dengan demikian mereka tidak akan mereka terjerumus ke dalam pertarungan komunikasi politik yang mereka tidak tahu. Dengan demikian jelas bahwa komunikasi politik adalah sebuah keperluan yang sangat mendesak bagi peserta didik yang sudah dipersiapkan sebagai aparat dan pejabat teras Negara di lapangan.

Arti Penting Interaksi Antar Negara dan Citra Bangsa

We can't not communicate, demikianlah salah satu aksioma komunikasi yang menunjukkan bahwa manusia tidak bisa tidak berkomunikasi, pasti mereka berkomunikasi satu dengan yang lain dalam keperluan bersosialisasi. Hal ini membuktikan dengan jelas, bahwa manusia adalah mahluk sosial atau *Das Communal*. Dengan demikian jelas bahwa bangsa Indonesia tidak mungkin tidak berinteraksi dengan bangsa lain. Keterbukaan bangsa Indonesia dan keramahannya menunjukkan Indonesia sedemikian menghormati dan mau bergaul dengan bangsa lain. Semua ini karena memang zaman menuntut hal seperti itu, dunia sudah berubah menjadi sangat dekat dan bisa ditempuh dan dihubungkan hanya melalui sebuah gawai berbantuan jejaring internet.

Apalagi ditambah dengan teknologi transportasi yang sedemikian pesat sehingga

sesuai hasrat manusia yang sifatnya dinamis berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain menjadi sangat memungkinkan dalam hitungan menit dan detik. Tidak hanya dalam negeri melainkan luar negeri antar negara dan bangsa. Konteks ekonomi menjadi global dan pasar sudah menjadi pasar bebas dunia, tidak ada lagi batasan teritorial politik dan hukum Negara. Aturan yang ada secara internasional dan orang Indonesia berhubungan dengan bangsa asing adalah sesuatu yang biasa dan lumrah dalam tata percaturan interaksi antar masyarakat dunia di era tatanan masyarakat informasi baru.

Dalam berinteraksi tentu saja ada sesuatu yang dikhawatirkan adalah tata pergaulan dan luntarnya nilai-nilai budaya lokal. Inti dari interaksi adalah identitas diri yang akan mengerucut pada identitas nasional. Isu ini juga disebutkan secara lugas dan diprediksikan oleh peletak pemikiran komunikasi sosial sejak dahulu. Tertutup dan tidak mau bergaul dengan bangsa lain adalah tidak mungkin terjadi, namun penguatan pada kesadaran nilai-nilai tradisi lokal dan pemahaman bahwa budaya bangsa sendiri yang adi luhung adalah yang disarankan berulang-ulang dalam literatur yang berbicara tentang komunikasi sosial ini.

Identitas bangsa dan Negara seperti yang kerap disebut-sebut dalam literatur adalah modal kekuatan dan benteng terakhir pada kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Pengakuan identitas bangsa hanya bisa dibentuk dari penciptaan citra bangsa melalui sarana komunikasi sosial yang ada. Sebut saja tradisi dan norma yang kuat di masyarakat juga kebiasaan lokal yang terjaga dalam keperluan citra diri dan bangsa yang sesungguhnya dan menjadi akar dari identitas sosial.

Bila berbicara citra maka yang akan tergambar adalah bagaimana profil orang Indonesia dalam tata pergaulan komunikasi internasional? Tentu saja ini tidak bisa dibentuk

secara serampangan dan tanpa rencana yang jelas. Orang Indonesia ramah, perhatian, terbuka, mudah membantu, tolong menolong, musyawarah untuk mufakat, religius dan lentur dalam bersikap dan berperilaku adalah gambaran mudah tentang orang Indonesia. Citra ini akan berubah atau malah hilang begitu saja dengan tidak ada upaya Negara menjaga citra tersebut. Aparatur Negara harus bisa memainkan citra mereka di mata publik, dengan demikian orang tidak terjebak pada persepsi negatif yang ada tentang lembaga pemerintah yang belum tentu benar keberadaannya.

Perlunya penjagaan citra atau cap (*brand*) yang ada di mata masyarakat dunia, maka peserta didik komunikasi sosial harus memahami, menguasai kemampuan dan kompetensi pengelolaan komunikasi publik yang praktiknya saat ini diwujudkan dalam kajian *Public Relations*. Di sini perlu dipahami, bahwa berbeda antara kajian *Public Relations* dengan Humas (Hubungan Masyarakat). *Public Relations* bersifat lebih luas tidak sekedar hubungan dengan masyarakat saja, melainkan hubungan dengan publik. Pemahaman publik tidak hanya masyarakat yang ada, melainkan seperti ; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), *Stake Holder*, Komunitas, Pemerintah (*Government*), bahkan pers.

Memahami kerja *public relations*, tentang bagaimana menyusun strategi dan taktik pesan komunikasi, pemilihan segmentasi, targeting dan positioning untuk mengarah kepada siapa informasi pesan dimaksud adalah kajian dari *public relations*. Tidak itu saja penting bagaimana aparatur negara berhubungan dengan aparatur negara, hubungan antara aparatur Negara dengan pers, bahkan kelompok terasing, melalui ; negosiasi, argumentasi dan persuasi yang tepat sasaran.

Tidak itu saja pola berdramaturgi bagi aparatur negara untuk menjaga kewibawaan dan

identitas diri bangsa menjadi penting saat ini. Aksi lakon dan panggung dari aparatur Negara kepada masyarakat dan bangsa asing dunia lain menjadi penting oleh sebab itu perlu bagi peserta didik memahami persiapan untuk naik panggung komunikasi di depan masyarakat dan pers yang bisa menjadi corong mereka dalam memberikan informasi relevan kepada masyarakat.

Komunikasi Sosial dan Keamanan Nasional

Keberadaan komunikasi sosial mampu memunculkan rasa aman dan kenyamanan seperti disebutkan dalam literatur tentang komunikasi sosial dengan gamblang;

“Sebagaimana diketahui bahwa komunikasi sosial bermaksud mencapai suatu integrasi.... Secara visual dapatlah dikatakan bahwa integrasi sosial diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada manusianya dan rasa aman ini hanyalah dapat diperoleh dalam suatu ikatan sosial,” (Susanto, 1985:18)

Dari pernyataan di atas jelas bahwa komunikasi sosial diadakan dalam keperluan konteks keamanan dan kenyamanan sebab dipahami, bahwa komunikasi sosial menuju pada keterikatan sosial dan semua itu berakar pada rasa integrasi sosial yang banyak disebutkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Para pencetus kajian komunikasi sosial sudah memikirkan ke arah itu dalam konstelansi negara dan bangsa dalam perancangan politik tingkat dunia. Pemahaman keamanan dan kenyamanan adalah sangat erat satu dengan yang lain dan sangat cair dalam pemahaman.

Komunikasi sosial yang sehat dan serasi akan memunculkan komunikasi timbal balik yang seimbang dan saling berbagi satu dengan yang lain. Seperti konsep sistem adanya pengirim pesan, pesan yang berjalan juga saluran komunikasi yang kondusif juga penerima yang memahami sepenuhnya isi pesan tanpa

adanya kesalahan interpretasi dan persepsi yang menyimpang dan diakhiri dengan adanya arus timbal balik dari penerima. Tentu saja ada ketergangguan (*noise*) dalam proses komunikasi dan itu adalah sebuah yang wajar dan biasa terjadi.

Dengan adanya hubungan timbal balik, maka akan terbentuk integrasi sosial yang 'digadang-gadang' sebagai prestasi besar Negara dalam mengikat bangsa dan warganya. Imbas dari kemampuan relasi sosial, maka yang akan terjadi adalah penguatan sektor keamanan dan pertahanan yang dalam hal ini disebut dengan istilah KAMNAS (Keamanan Nasional). Satu yang dipahami menyoal keamanan dan pertahanan nasional tidak lepas dari konteks keamanan global atau dunia. Demikian juga dengan konsep keamanan dan pertahanan regional bangsa-bangsa yang akan terbentuk dari keamanan dan pertahanan nasional suatu bangsa.

Praktik ini sudah banyak dilakukan di Negara lain, seperti ; Australia dan Amerika Serikat dimana polisi sebagai aparatur Negara memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakkan hukum di luar wilayah hukum mereka selama itu adalah kepentingan yang sangat mendesak. Dapat dibayangkan jauh sebelum orang luar negeri baru mengarah ke sana, para pendiri komunikasi sosial sudah memikirkan pentingkan komunikasi sosial dalam kepentingan KAMNAS (Keamanan Nasional). Dengan demikian, tidaklah berlebih bila Komunikasi Sosial dijadikan kajian penting bahkan perlu untuk diajarkan kepada peserta didik. Dengan kesadaran tinggi akan pentingnya komunikasi sosial maka hal ini akan membuka nuansa dan 'angin baru' pentingnya komunikasi sosial dalam praktik kehidupan para aparat di lapangan.

Kesimpulan dan Saran

Dari temuan di atas jelas, bahwa pada pendiri dan peletak dasar konsep komunikasi sosial memahami sepenuhnya atas prediksi perkembangan keamanan nasional dikaitkan dengan konstelansi dunia. Keamanan nasional dalam negeri menjadi perhatian utama sehubungan dengan pertarungan perang dingin (*cold war*) antara dua kubu blok Barat dan Timur yang merambah ke berbagai sendi kehidupan bangsa. Ancaman dari luar tidak berbentuk serangan fisik melalui kekuatan pasukan, melainkan lebih halus dari itu, yakni; pengaruh sisipan informasi dan data intelijen yang merasuk melalui saluran budaya dan media massa.

Perlawanan yang diberikan Negara Indonesia bukan hanya membatasi dan menyaring pengaruh asing tersebut, melainkan dengan perbaikan sikap mental dan kewaspadaan bangsa dengan pemilahan informasi itu sendiri, dalam kategori berguna dan tidak berguna bagi kehidupan mereka dalam berbangsa dan bernegara. Satu yang dipahami, bahwa banyak masyarakat masih awam terhadap literasi mereka dalam penggunaan informasi dan ini menjadi tugas aparat negara termasuk polisi untuk memberikan arahan dan sosialisasi yang sejelas-jelasnya dan berguna bagi masyarakat.

Dengan demikian jelas dalam konteks komunikasi sosial, peran aparat negara sedemikian penting sehubungan dengan proses penerangan dan penyuluhan pemilahan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumbatan yang besar dalam komunikasi dari Negara kepada masyarakat merupakan problematika terbesar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu kendala ini perlu diminimalisirkan atau bahkan dihilangkan dalam upaya membuang jauh gangguan (*noise*) dalam proses berkomunikasi dalam kehidupan berbangsa.

Dalam rangka menghilangkan gangguan (*noise*) dan masyarakat tidak terjebak dalam

pemahaman liar tentang pengaruh dari luar maka perlu penguatan akan kemampuan dan kompetensi komunikasi bagi aparat dan petugas Negara yang dalam konteks keamanan nasional dalam negeri adalah Polisi. Di sini pengajaran komunikasi sosial tidak hanya berbicara tentang penyuluhan dan penerangan, melainkan lebih dari itu, yakni seperti ; komunikasi politik, komunikasi antar budaya, media massa sampai dengan *Public Relations*. Dari pengajaran komunikasi sosial ini diharapkan peserta didik calon pemimpin Polri masa depan mampu menempatkan citra dan prediksi perubahan yang ada pada bidang kerja mereka dalam konteks komunikasi. Anggota Polri tidak akan terkungkung pada dunia mereka yang tidak peka dan memahami perubahan konstelansi dunia luar.

Tak heran bila dalam pembahasan yang dalam dari literatur komunikasi sosial disebutkan kekuatan keamanan nasional dalam tataran regional dan global adalah interaksi yang berkesinambungan antara masyarakat Indonesia dengan asing. Di era keterbukaan hal ini tidak bisa dihindari, termasuk petugas kepolisian. Rancang bangun perkembangan zaman dengan kompetensi komunikasi sosial sangat diperlukan, apalagi melihat sedemikian deras dan menakutkannya pengaruh asing masuk ke negeri ini melalui penetrasi budaya yang ada di kalangan remaja. Kewaspadaan, kecurigaan dan pencegahan adalah perlu di era digital ini bagi petugas kepolisian dengan memahami cara berkomunikasi dalam tataran etika dan pergaulan di dunia era 4.0 saat ini.

Kewaspadaan anggota polisi dalam menggunakan jejaring sosial media dan cara bertutur dan membuat pernyataan menjadi perhatian khusus yang sebenarnya luput dalam pembahasan dan prediksi kemungkinan terjadi dalam medan kerja dan kehidupan polisi ke depan. Perubahan tingkat kepercayaan informasi yang akan bergeser dari informasi

statis media massa menjadi interaktif jejaring sosial media internet akan terjadi, alhasil semua orang bisa menjadi penerbit dan produser isi pesan. Pemahaman ini yang tidak ada dalam pembahasan mendalam komunikasi sosial dalam perkembangan kewaspadaan anggota kepolisian.

Tidak itu saja, kelenturan (fleksibel) sikap anggota polisi diperlukan dalam rangka memahami pengaruh asing dengan tidak terlalu berlebihan dan terlalu ketat menjaga keamanan dalam negeri. Apalagi dipahami era keterbukaan pasar bebas pasti terjadi dan polisi harus melakukan perubahan akan tampilan dan perwajahan mereka di masyarakat dengan konsep polisi yang bersahabat dan menjadi mitra masyarakat, bukan sebaliknya. Dalam dunia pendidikan jelas, anggota polisi dituntut memiliki kemampuan dan kompetensi komunikasi terutama dalam muatan komunikasi antar budaya (*intercultural communication*) juga komunikasi lintas budaya (*crosscultural communication*) dengan demikian maka anggota polisi sebagai aparaturnegara bisa tampil luwes dan memahami perubahan dan perkembangan konstelansi dunia.

Dengan demikian tidak akan ada anggota polisi yang memiliki profil kaku, arogan dan seperti robot karena tidak bisa luwes bergaul dan semua ini akan mengerucut pada tampilan dan citra Polri di masyarakat. Bahkan lebih luas lagi akan menghantam ketidakpercayaan pada praktik penegakkan hukum dan rasa keamanan dan kenyamanan masyarakat. Bila ini terjadi jelas, bahwa saluran komunikasi sudah rusak dan proteksi kepada masyarakat akan ancaman dan gangguan dari luar tidak ada, maka yang perlu disalahkan adalah rancang bangun komunikasi tersebut dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional. Perdebatan harusnya mengarah kepada sistem yang bekerja bukan pada individu atau pribadi orang perorang karena yang bermasalah adalah aturan yang ada dalam sistem tersebut.

Dari semua pemaparan temuan tersebut, dapat disimpulkan, bahwa perkuliahan subyek komunikasi sosial sedemikian perlu dalam menjawab tantangan dan ancaman yang terjadi dalam perubahan konstelasi keamanan nasional yang ada dalam peradaban manusia. Penguatan pada kemampuan dan kompetensi dari pelaku Pemerintahan termasuk aparatur Negara adalah sangat perlu. Oleh sebab itu adalah perlu pola komunikasi yang terdesain praktis bagi aparatur Negara untuk keperluan praktik di lapangan langsung ketika mereka berhadapan langsung dengan masyarakat.

Dengan demikian maka disarankan agar pengajaran ilmu komunikasi sosial perlu diselenggarakan dan diteruskan karena sedemikian penting keberadaanya. Namun diakui perlu pengembangan terutama pada praktik aplikasi dan penerapan di lapangan. Pendekatan akan pengembangan komunikasi antar budaya dan retorika politik dalam percaturan politik dunia perlu dengan tidak melupakan nilai politik lokal. Di lain sisi diperlukan juga pemahaman komunikasi dan informasi di era digital dengan pendekatan kepada penggunaan jejaringan internet bagi peserta didik. Dengan demikian literasi media era digital menjadi bahasan penting dalam penerapan di lapangan sehingga tidak ada kesalahan dalam berkomunikasi dan menggunakan informasi pada selanjutnya.

Bibliografi

“5 Pengertian Pertahanan Negara Menurut Para Ahli Beserta Tujuannya,” (tersedia di <http://www.gurupendidikan.com/5-pengertian-pertahanan-negara-menurut-para-ahli-beserta-tujuannya/> [diunduh 4/5/2016]).

Eriyanto (2002). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenada Media

Indonesia. Pidato Presiden Soeharto,

Amanat Pada Penataran P4 Bagi Para Pimpinan Redaksi/Ketua Cabang PWI Seluruh Indonesia, Bina Graha 15/2/1979. Jakarta : Sekretariat Negara.

Keamanan Nasional: sebuah konsep dan sistem keamanan bagi Bangsa Indonesia. (<http://www.aiendro.info/buku/Buku%20Kamnas%20wantannas.pdf> [diunduh 5/5/2016]).

Kriyantono, Rachmat (2008). *Teknik praktis riset komunikasi : disertai contoh praktis riset media, public relations, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Prisgunanto, Ilham (2013). Konstruksi Kekerasan Dalam Potret Pemberitaan Islam di Kanal Informasi Internet (Analisis Framing Terhadap Website dan Portal Informasi Bergender Islam). *Jurnal Communication*, Vol. 4 No. 1 tahun 2013.

Prisgunanto, Ilham (2004). Keberpihakan di balik isu-isu pemberitaan perang Irak: analisis framing terhadap empat surat kabar nasional (Kompas, Media Indonesia, Republika dan Suara Pembaruan). *Jurnal Thesis*, Vol. 3 No. 1 tahun 2004.

Sobur, Alex (2006). *Semiotika komunikasi*. Bandung : Rosdakarya.

Susanto, Astrid. S (1985). *Komunikasi Sosial di Indonesia*. Bandung : Binacipta.

TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Panca Karsa). Jakarta : Sekretariat DPR/MPR RI

TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Jakarta : sekretariat DPR/MPR RI.

Wibowo, Indiwana Seto (2004). *Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian dan Skripsi Komunikasi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.